BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling berinteraksi satu sama lain, dan saling membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, manusia hidup berpasang-pasangan yang membentuk sebuah keluarga yang diikat dengan suatu perkawinan.¹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki –laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.

Di dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan pengertian perkawinan yakni :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 66.

² Pasal 1 Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Rhedbook Publisher, 2008), 461.

Jadi menurut undang–undang ini, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian 2 orang pria saja atau wanita saja. Demikian juga, tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria atau wanita sekaligus.³

Suatu perkawinan itu dianggap sah secara hukum Islam apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 keabsahan suatu perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 2 yaitu perkawinan itu terjadi apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, harus dicatatkan, atas persetujuan kedua mempelai, tidak memiliki hubungan darah, tidak dalam ikatan perkawinan, serta bukan pasangan suami istri yang telah bercerai dua kali.⁴

Putusnya perkawinan antara suami istri itu terdapat dalam beberapa bentuk, tergantung terhadap siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut. Dalam hal ini terdapat empat kemungkinan, yaitu:⁵

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri, yaitu melalui matinya salah seorang suami istri tersebut. Maka dengan adanya kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

³ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 54.

⁴ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 197.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak tepatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Fasakh menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, *fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat –syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal –hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.⁶

⁶ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih MSunakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 73.

Dalam Pasal 22 Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: “Pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”⁷

Sedangkan dalam Pasal 24 dalam undang-undang yang sama dinyatakan: “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”.⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak –pihak yang berkepentingan.⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 71 KHI, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata dikemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;

⁷ Pasal 22 Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Rhedbook Publisher, 2008), 466.

⁸ *Ibid*, 466.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 45.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang –undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2) dalam KHI, yakni :

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”¹⁰.

Yang dimaksud dengan penipuan ialah suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.¹¹

Melihat penjelasan di atas, penipuan diri suami sebagai alternatif suami untuk bisa melangsungkan pernikahan baru tanpa izin dari istri sebelumnya. Padahal sudah dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (1) KHI yang berbunyi:

Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat – syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang – undang no. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri;

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 14.

¹¹ *ibid*, 38.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka.¹²

Maka harus dipenuhinya syarat – syarat yakni adanya persetujuan dari istri/ istri – istri.

Berkaitan kasus di atas Putusan Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara No: 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan. Gambaran perkaranya yakni seorang istri (Pemohon) mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Lamongan, dan yang menjadi Termohon I yakni suami Pemohon, sedangkan yang menjadi Termohon II yakni istri ke 2 Termohon I.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah antara Termohon I dan Termohon II, kerena ketika menikah dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus duda mati (Surat Keterangan Untuk Nikah nomor: 470/77/413.237.1/2010, tanggal 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan), padahal pemohon sebagai istri syah Termohon I sampai sekarang masih hidup. Selain itu karena perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut dilakukan tanpa izin dari Pemohon sebagai istrinya dan tanpa izin dari Pengadilan Agama yang

¹²*ibid*, 11.

berwenang, maka pelaksanaan perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan lebih dari satu (*polygami*).¹³

Dalam proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, dan telah pula diupayakan melalui mediasi dengan menunjuk seorang hakim Pengadilan Agama bernama Drs. H. Nur Khasan, SH. MH., untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

Akan tetapi penulis merasa kurang tepat jika mediasi diterapkan dalam perkara pembatalan perkawinan seperti dalam perkara No: 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg, dalam perkara tersebut alasan istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan ke 2 suaminya dengan wanita lain tanpa seizin istri pertama dan suami juga memalsukan identitasnya dengan cara merubah statusnya menjadi duda mati padahal stri syahnya masih hidup. Dan hal ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (a) KHI dan Pasal 24 Undang –undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan dalam perkara ini, hakim tetap melakukan mediasi. Padahal dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama menjadi peraturan yang digunakan dalam perkara pembatalan perkawinan untuk masalah mediasinya, yaitu perkara pembatalan perkawinan tidak wajib melakukan prosedur mediasi, hal itu disebabkan karena perkara tersebut menyangkut legalitas hukum. Untuk itu

¹³ Nomor: 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg Putusan PA Lamongan tanggal 17 Juli 2012 , 4.

penulis meneliti tentang penggunaan mediasi dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan.

Hal ini sesuai dengan asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara yang diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU No. 7 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,¹⁴ dan juga dalam Pasal 4 Perma no. 1 Tahun 2008. Hal ini juga sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *islah* yang tercantum dalam QS. Al Hujurat: 10.¹⁵

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (QS.Al-Hujurat: 10).

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara.¹⁶

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) 67.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Quran Al Karim dan Terjemahan*, (Bandung: J-Art, 2005), 517

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 100.

Secara institusional proses mediasi di Pengadilan dilembagakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.¹⁷ Berdasarkan pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi. Selain itu tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.”¹⁸

Dalam Pasal 4 Perma no. 1 Tahun 2008 juga menjelaskan tentang kewajiban pengupayaan perdamaian, yang berbunyi:¹⁹

¹⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , 6.

¹⁸ Pasal 1 Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

¹⁹ Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Mediasi adalah konsep yang dianggap paling cocok oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan proses perdamaian dalam perkara perdata yang diatur oleh Pasal 130 HIR / 154 RBg. Pandangan tersebut berpangkal tolak dari asumsi bahwa proses perdamaian dengan menggunakan konsep mediasi dianggap akan lebih memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan proses perdamaian dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sendiri. Kehadiran mediator dalam proses perdamaian pada akhirnya bertujuan untuk memberikan suatu bentuk penyelesaian yang lebih cepat, lebih sederhana dan lebih murah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang –Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Akan tetapi penulis merasa kurang tepat jika mediasi diterapkan dalam perkara pembatalan perkawinan seperti dalam perkara No: 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg. Dalam perkara tersebut alasan istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan ke 2 suaminya dengan

²⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: ALFABETA, 2011), 67.

wanita lain tanpa seizin istri pertama dan suami juga memalsukan identitasnya dengan cara merubah statusnya menjadi duda mati padahal stri syahnya masih hidup. Dan hal ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (a) KHI dan Pasal 24 Undang –Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan dalam perkara ini, hakim tetap melakukan mediasi. padahal dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama menjadi peraturan yang digunakan dalam perkara pembatalan perkawinan untuk masalah mediasinya, yaitu perkara pembatalan perkawinan tidak wajib melakukan prosedur mediasi, hal itu disebabkan karena perkara tersebut menyangkut legalitas hukum. Untuk itu penulis meneliti tentang Penggunaan Mediasi dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan.

Berdasarkan gambaran singkat masalah yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Mediasi Dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 1087/ Pdt.G/ 2012/ PA.Lmg).

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam hukum perkawinan islam

2. Pengertian dan dasar hukum batalnya perkawinan (*fasakh*) dalam KHI dan Undang –undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Persyaratan poligami dalam perundang –undangan di Indonesia.
4. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata.
5. Pengertian dan sejarah mediasi.
6. Dasar hukum mediasi.
7. Mediasi dalam peundang –undangan di Indonesia.
8. Sejarah munculnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
9. Perkara –perkara yang wajib melakukan prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
10. Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi terhadap perkara pembatalan perkawinan.
11. Pertimbangan Hakim tentang kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg.
12. Alasan –alasan yang mewajibkan adanya prosedur mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan.
13. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara tersebut dengan melalui prosedur mediasi.

C. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Proses mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara Nomor 1087/ Pdt.G/ 2012/ PA.Lmg.
2. Analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap penggunaan mediasi dalam pembatalan perkawinan Studi Kasus Putusan Nomor 1087/ Pdt.G/ 2012/ PA.Lmg.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2012/Pa.Lmg) ?
2. Bagaimana analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap penggunaan mediasi dalam pembatalan perkawinan (Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2012/Pa.Lmg) ?

E. Kajian Pustaka

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini mengenai mediasi sebenarnya sudah ada yang membahas, akan tetapi dari pandangan masing-masing penulis mempunyai pendekatan dan titik tolak pembahasan yang berbeda, diantaranya adalah:

1. Ayu Malinda Bulqis, dengan skripsinya yang berjudul “ Penolakan Penggunaan Prosedur Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0413/Pdt.G/2011/Pa.Gs),” kesimpulan dalam penelitian ini bahwasannya pertimbangan hakim tidak menggunakan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan karena Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Dalam perkara pembatalan perkawinan, peraturan yang digunakan untuk masalah mediasi ialah KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yaitu perkara tersebut tidak wajib melakukan prosedur mediasi, hal itu disebabkan karena perkara tersebut menyangkut legalitas hukum.

Memang membahas masalah yang sama yakni mediasi, akan tetapi pendekatan dan sudut pandang pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skripsi penulis, terutama dalam skripsi yang ditulis oleh Ayu Malinda Bulqis yang memiliki kesamaan obyek yakni tentang mediasi dalam

pembatalan perkawinan. Bahwa dalam skripsi ini merupakan penelitian tentang penggunaan dari mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan. Dan dalam skripsi ini juga mengulas tentang proses / pelaksanaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan dan dasar hukum yang menjadi alasan hakim. Dan mengulas alasan hakim tetap mengupayakan perdamaian meskipun dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yaitu perkara tersebut tidak wajib melakukan prosedur mediasi,

2. Agustina Kumala. D.S, dengan skripsinya yang berjudul “Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.” Dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

Dalam skripsi Agustina Kumala. D.S, jelas yang dibahas dalam skripsinya mengenai mediasi pada perkara perceraian. Sedangkan yang dibahas dalam skripsi penulis tentang mediasi dalam pembatalan perkawinan.

3. Atika Inatsun Najah, dengan skripsinya yang berjudul “ Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi

Analisis Dengan Perspektif Perma RI No. 2 Tahun 2003 Dan Hukum Islam).” Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa proses di Pengadilan Agama Sidoarjo prosesnya dilaksanakan setelah pemeriksaan perkara berjalan. Yuridiksinya mengenai perkara yang sifatnya (contentius) yaitu mengandung unsur harta benda seperti harta bersama waris, wakaf, ekonomi syariah, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Hukum mediator ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dengan suatu penetapan dalam upaya membantu majelis hakim mendamaikan para pihak diluar sidang. Kemudian majelis hakim melanjutkan pokok perkara sedang mediator menyelesaikan masalah krusial diluar sidang.

Sedangkan fokus dalam skripsi penulis tentang penggunaan mediasi dalam pembatalan perkawinan.

Sehinga menurut hemat penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum diisi dalam penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi pada perkara pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg).

2. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap penggunaan mediasi dalam pembatalan perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 1087Pdt.G/2012/PA.Lmg).

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum acara perdata khususnya masalah mediasi.
 - b. Sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa atau praktisi hukum dalam penyelesaian masalah tentunya mengenai mediasi.
 - c. Sebagai penambah wawasan keilmuan dan memperkaya pengalaman bagi mahasiswa, mediator, advokat, dan praktisi hukum lainnya.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keefektifan mediasi dalam hal perceraian di Pengadilan Agama.
 - b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

1. **Analisis Yuridis** : menganalisis obyek penelitian dengan bertumpu pada teori mediasi dalam hukum acara perdata dan perundang –Undangan yang berlaku di pengadilan Agama Lamongan. Yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
2. **Penggunaan Mediasi dalam Pembatalan perkawinan:** Pemakaian mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator dalam perkara pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Lamongan berdasarkan tuntutan istri.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang berupa berkas-berkas perkara dan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam menangani perkara tersebut, meliputi:

- a. Data tentang putusan PA Lamongan Nomor 1087/Pdt.G/2012/ PA.Lmg.

- b. Data tentang pelaksanaan mediasi dalam mengupayakan perdamaian dalam hal pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan.
- c. Data tentang Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber Primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.²¹ yaitu:

- 1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.
- 2) Putusan PA Lamongan nomor 1087/Pdt.G/2008/PA.Lmg.
- 3) Para hakim yang terlibat dalam putusan tersebut.

b. Sumber data sekunder

Berupa literatur yang berkenaan dengan hukum materiil dan formil perdata yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain:

- 1) KUH Perdata (BW).
- 2) RIB/HIR
- 3) D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*.
- 4) Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997) , 116.

- 5) Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.*
- 6) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.*
- 7) Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia.*
- 8) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.*
- 9) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*
- 10) M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai.*
- 11) Musahadi HAM, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia.*
- 12) Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan.*
- 13) Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional.*

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dari sumber di atas, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara menggali data melalui berkas-berkas dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti akan melakukan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni mengenai mediasi dan

pembatalan perkawinan secara umum, serta mengenai Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan putusan PA Lamongan nomor 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg tentang pembatalan perkawinan.

- b. Wawancara/*interview* yaitu dilakukan dengan cara dialog dengan hakim-hakim yang terlibat dalam permasalahan penelitian ini. Hal ini karena objek dari penelitian ini merupakan wilayah hukum praktis yakni tentang Mediasi dan Putusan Pengadilan. Maka wawancara akan dilakukan oleh peneliti kepada para Hakim yang memutuskan perkara PA tersebut diatas serta tentang kaitannya dengan mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode analisis deskriptif ialah menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan,²² dengan menggambarkan dan memaparkan tentang putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan yang menggunakan proses mediasi, kemudian dianalisis dengan kedudukan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi sehingga menghasilkan pemahaman secara kongkrit dan jelas.

²² Moch Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, cet. VI, 2005), 63.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu diawali dengan menggunakan teori –teori mengenai pembatalan perkawinan dan mediasi yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang pembatalan perkawinan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam lima bab yang tiap bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua pada bab ini merupakan landasan teori yang merinci tentang pengertian tentang ketentuan –ketentuan secara umum tentang pembatalan perkawinan dan mediasi yang mencakup pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan dalam perundang – undang di Indonesia, persyaratan poligami, pengertian mediasi, mediasi dalam peradilan di Indonesia termasuk didalamnya, selanjutnya membahas tentang kekuatan hukum mediasi dilihat dari segi Perma Nomor 1 tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi.

Bab ketiga pada bab ini merupakan data penelitian yang meliputi sekilas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Lamongan mencakup kompetensi dan wilayah hukumnya serta struktur kepengurusan yang terdapat di dalamnya, selanjutnya mengarah kepada prosedur mediasi dalam perkara pembatalan pernikahan dan selanjutnya mengarah kepada dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Nomor 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg yang melalui prosedur mediasi.

Bab keempat pada bab ini berisikan tentang analisis yuridis terhadap hasil penelitian di lapangan dengan ditinjau dari hukum acara perdata khususnya tentang mediasi terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1087/Pdt.G/2012/PA.Lmg, yang mencakup tentang pertimbangan hakim dalam menyarankan / mengarahkan penggunaan prosedur mediasi.

Bab kelima pada bab ini memuat Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.